

**KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(STUDI KASUS BENCANA BANJIR DI KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG)**

***REGIONAL DISASTER MANAGEMENT COORDINATION  
(CASE STUDY OF FLOOD DISASTERS IN RANCAEKEK DISTRICT,  
BANDUNG DISTRICT)***

**Okky Firmansyah<sup>1</sup>, Rafih Sri Wulandari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang sering mengalami bencana banjir, adapun kecamatan yang sering dilanda banjir adalah kecamatan rancaekek. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Salah satu yang diamanatkan oleh Perda tersebut adalah harus adanya koordinasi antar instansi dalam menanggulangi bencana banjir tersebut. Namun hal itu belum dilakukan secara optimal oleh instansi-instansi bersangkutan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah koordinasi adalah Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Secara keseluruhan tiap-tiap faktor telah dilaksanakan dengan baik, adapun yang menjadi catatan ialah faktor kesatuan tindakan dikarenakan faktor ini belum terlaksana dengan baik oleh setiap instansi yang memiliki wewenang dalam menanggulangi banjir.

**Kata Kunci:** Koordinasi dan Penanggulangan Bencana

*ABSTRACT*

*Bandung Regency is one of the districts that often experience floods, while the districts that are often hit by floods are the Rancaekek sub-district. To overcome this problem, a Regional Regulation No. 11 of 2010 was established on the establishment of the Bandung District Disaster Management Agency organization. One that is mandated by the Regional Regulation is that there must be coordination between agencies in tackling the flood disaster. However, this has not been done optimally by the relevant agencies.*

*The factors that influence the success of a coordination are Unity of Action, Communication, Division of Work and Discipline. Overall, each factor has been carried out properly, while the one that becomes a note is the unity of action because this factor has not been implemented properly by every agency that has the authority to overcome flooding.*

**Keywords:** *Coordination and Disaster Management*

**1. Pendahuluan**

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang sering mengalami bencana banjir. Dari beberapa

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung salah satunya yaitu Kecamatan Rancaekek yang sering mengalami banjir pada setiap musim penghujan yang merugikan masyarakat. Kecamatan

Rancaekek memiliki 13 desa dan 1 Kelurahan yaitu desa Bojongloa, Bojongsalam, Cangkuang, Haurpugur, Jelegong, Linggar, Nanjung mekar, Rancaekek kulon, Rancaekek wetan, Sangiang, Sukamanah, Sukamulya, Tegal sumedang, dan Kelurahan Rancaekek Kencana. Data pada tahun 2016 desa yang menjadi langganan bencana banjir dan menjadi desa terparah yang terkena dampak dari bencana banjir adalah Desa Bojongloa, Tegal Sumedang, Linggar, dan Kelurahan Rancaekek kencana. Dimana beberapa desa tersebut rusak parah dan banyaknya harta benda yang hilang karena terendam dan terbawa arus banjir, ketinggian dari bencana banjir tersebut 60 sentimeter hingga 1,5 meter, Sebanyak 69.914 penduduk mengalami kerugian karena harta benda yang hilang maupun kerusakan pada rumah dan lingkungan akibat bencana banjir tersebut. Selain kerugian harta benda yang di timbulkan bencana banjir adalah akses transportasi terganggu salah satunya jalan penghubung Bandung-Garut dan juga jalur penghubung antara Rancaekek-Majalaya.

Rangkaian bencana yang dialami Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Rancaekek telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Badan penanggulangan bencana daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. Kompleksnya masalah penanganan banjir membutuhkan koordinasi yang terpadu

dari berbagai instansi pemerintah. Badan penanggulangan bencana daerah dipimpin oleh Sekda Kabupaten Bandung, dengan dibentuknya Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bandung diharapkan bisa melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di Kecamatan Rancaekek dengan sikap proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana banjir..

Dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan beberapa instansi, yaitu Dinas Kebersihan yang memiliki tugas pokok menjaga kebersihan lingkungan dari sampah yang dapat menimbulkan bencana banjir, Dinas sosial memiliki tugas pokok yaitu menyediakan bahan pokok makanan dan pakaian bagi para korban bencana banjir, dan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan berupa pemberian obat-obatan dan pengecekan kondisi para korban bencana.

Namun ternyata koordinasi yang ada saat ini masih belum dilakukan sebagaimana mestinya, koordinasi antara instansi yang terjadi saat ini pada penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rancaekek, menurut data yang dikumpulkan menunjukkan indikasi masalah di antaranya :

1. Belum optimalnya Kesatuan tindakan dalam melakukan sosialisasi dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Belum terjalinnnya Komunikasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Banjir

Daerah dengan instansi-instansi yang bekerjasama dalam penanggulangan bencana banjir.

3. Pembagian kerja dalam Perencanaan penanggulangan bencana dengan sikap proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana banjir belum berjalan dengan baik. Karena masih ada beberapa daerah yang berada di Rancaekek yang belum mendapatkan perhatian dalam Penanggulangan Bencana Banjir salah satunya Desa Bojongloa dan Desa Tegal Sumedang yang belum adanya penanganan lebih lanjut.
4. Masih kurangnya kedisiplinan pada saat adanya undangan rapat, sosialisasi dan simulasi penanggulangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Koordinasi

Menurut para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang koordinasi yang dapat diterima oleh pihak lain, karena masing-masing ahli memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini peneliti mengemukakan beberapa pendapat ahli tentang koordinasi, sebagai berikut :

Menurut pendapat Terry dalam putra (2014: 2) menjelaskan bahwa :

“Koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan

tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbandingan antara koordinasi dengan kerjasama. Kerjasama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama”.

Pengertian koordinasi menurut Ndraha (2011:291) menyatakan bahwa,

“Koordinasi adalah proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lain”.

Menurut Handoko (2003:195) berpendapat bahwa “koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”.

Dari beberapa pengertian mengenai koordinasi menurut para ahli yang dijabarkan melalui pemahaman dalam konsep dasar koordinasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga dari sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada

pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak kegiatan yang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan menurut Hasibuan (2006:88) guna membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan masalah koordinasi dalam penanggulangan bencana, yaitu :

#### 1. Kesatuan tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

#### 2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam

organisasi akan dapat di koordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia.

#### 3. Pembagian kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*), prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya melakukan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi, pembagian kerja menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik maupun melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas.

#### 4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat

menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

## **2.2 Konsep Penanggulangan Bencana**

### **2.2.1 Pengertian Bencana**

Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 1 ayat (1), bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dibagi menjadi tiga jenis menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu :

1. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain gagal teknologi,

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

### **2.2.2 Pengertian Bencana Banjir**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.

Bencana banjir adalah suatu peristiwa alam dimana terendamnya suatu daerah atau dataran yang terendam karena volume air yang meningkat dan tidak terbendungnya volume air oleh bendungan atau sungai yang menyebabkan air tersebut naik ke permukaan dan menggenangi daratan. Biasanya banjir tersebut disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dan karena beberapa faktor lainnya.

Bencana banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

- a) Curah hujan yang tinggi

Disini banjir terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi atau turunnya hujan dengan sekala yang cukup besar dan menggenangi daratan yang asalnya kering, dan juga tidak tertampungnya air karena hujan yang cukup tinggi yang membuat meluapnya air ke daratan.

b) Sampah yang menyumbat

Faktor ini disebabkan oleh kurang sadarnya para penduduk atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, bahkan sering masyarakat membuang sampah ke sungai. Selain sampah yang menumpuk, banyak bangunan di pinggir aliran air yang di bangun yang membuat penyempitan aliran air di sungai.

c) Penebangan pohon liar yang seenaknya saja

Penebangan pohon atau berkurangnya area tanaman hijau sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Diperlukanya reboisasi sebagai prioritas untuk menambah hutan kota sebagai tempat resapan air.

d) Drainase yang sudah di ubah tanpa memperhatikan amdal

Drainase yang sudah di ubah tanpa memperhatikan amdal yang terlebih dilingkungan perkotaan. Daerah hutan ataupun rawa yang dapat membantu untuk mencegah atau mengurangi banjir, namun dipakai untuk membangun mall atau bangunan lain sehingga merusak daerah resapan air.

### 2.2.3 Penanggulangan Bencana

Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan

menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penanggulangan bencana harus memiliki prinsip seperti cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, dan non diskriminatif sehingga dari penanggulangan bencana dapat tercapai.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian di dapatkan melalui dua sumber data yaitu : Data primer dan Data sekunder Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik triangulasi ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu : Observsi Partisipan, Wawancara Mendalam dan Dokumentasi . Teknik Analisis Data melalui Reduksi Data, Sajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi dan Pengambilan kesimpulan.

### 4. PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana banjir maka perannya sangatlah penting dengan melakukan kerjasama antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Camat Rancaekek, dan Masyarakat itu sendiri sangatlah penting karena masyarakat setempat yang merasakan dampak dari adanya bencana banjir. Dalam menanggulangi bencana

banjir haruslah didukung oleh berbagai instansi terkait., Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator di lapangan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait guna meminimalisir korban yang di akibatkan bencana tersebut dengan menanggulangi bencana,

Dengan adanya koordinasi yang baik antar BPBD dengan beberapa instansi terkait, masyarakat akan dapat menilai dan menikmati hasilnya secara langsung dengan kata lain bisa menilai efektif atau efisien ataukah belum dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Maka dari itu agar masyarakat dapat berperan serta pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Camat Rancaekek maupun instansi yang bekerja sama dalam menanggulangi bencana harus bisa memberikan dorongan atau motivasi melalui pembekalan pengetahuan tentang sadar akan bencana agar masyarakat bisa saling menjaga satu sama lain maupun menjaga lingkungannya agar meminimalisir bencana yang sangat parah dan meminimalisir korban jiwa akibat bencana tersebut. Pemerintah daerah pun harus memberikan sebuah kebijakan untuk menjadi patokan dalam menanggulangi bencana melalui peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2010 dimaksudkan untuk bisa meminimalisir bencana dengan maksud meminimalisir korban jiwa yang di akibatkan bencana itu sendiri dengan cara mengadakan penanggulangan bencana. Bencana alam selama ini di pandang

sebagai suatu yang di luar kontrol manusia karena bencana alam timbul akibat adanya peristiwa yang terjadi oleh alam itu sendiri seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, angin topan atau angin puting beliung, dan bencana banjir.

Untuk mengkaji masalah penanggulanga banjir di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, peneliti melakukan analisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif melalui teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006:88) yang berperan penting untuk kelancaran dalam berkoordinasi yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu : Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.

#### **A. Kesatuan Tindakan**

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa

untuk menciptakan keserasian dalam bertindak BPPD selalu mengundang rapat dan mengadakan simulasi penanggulangan bencana dengan instansi lainnya yaitu Dinas Sosial, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan dan Tokoh Masyarakat yang merupakan salah satu korban bencana banjir yang berada di Kecamatan Rancaekek namun dalam kenyataannya koordinasi yang dilakukan BPPD dengan beberapa instansi terkait dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Rancaekek melalui kesatuan tindakan belum berlangsung secara optimal. Untuk itu, harus adanya tindakan lebih lanjut agar permasalahan tersebut bisa di atasi dan dapat berjalan dengan baik.

### **B Komunikasi**

Komunikasi seringkali diartikan sebagai inti dari semua pemecahan masalah, karena komunikasi memuat semua informasi yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana agar dapat meminimalisir bencana dan meminimalisir korban jiwa yang timbul akibat bencana tersebut. Menurut Hasibuan (2006:88) Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat di koordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia.

Untuk keberhasilan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung komunikasi dengan cara saling tukar informasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan maupun dengan Camat Rancaekek dan Masyarakat Rancaekek.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggunakan akses penyampaian melalui alat komunikasi telepon, surat undangan dan rapat-rapat atau diskusi langsung sudah terbilang sangat baik.

### **C. Pembagian Kerja**

Menurut Hasibuan (2006:88) Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*), prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya melakukan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi, pembagian kerja menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik maupun melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas.

Untuk menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Rancaekek BPPD Kabupaten Bandung dalam berkordinasi harus membagi tugas baik untuk aparat dilingkungan BPBD maupun dengan beberapa instansi terkait.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa pembagian kerja yang terjadi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan yaitu sudah ada kejelasan tugas yang harus dilakukan masing-masing instansi dalam membantu dalam penanggulangan bencana, Dinas Kesehatan memiliki tugas untuk menyediakan obat-obatan dan pengecekan kesehatan korban bencana, Dinas Kebersihan memantau keadaan lingkungan maupun posko pengungsian korban bencana agar tetap terjaga kebersihannya meskipun masih adanya kesalahan dalam pengerjaannya.

#### **D. Disiplin**

Disiplin yaitu mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma yang berlaku. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa, Dengan adanya kedisiplinan dalam penanggulangan bencana khususnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung diharapkan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dalam penanggulangan bencana, walaupun harus bekerja pada siang hari maupun malam hari, karena keselamatan tergantung bagaimana kesiapsiagaannya dan juga dengan adanya bantuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan diharapkan akan lebih mempermudah dalam penanggulangan bencana banjir di

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Faktor Pendukung : Faktor pendukung keberhasilan penanggulangan bencana banjir, yaitu dengan adanya komunikasi dan sosialisasi antara pihak terkait dengan masyarakat untuk memberitahu apa yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana maupun saat terjadinya bencana agar masyarakat siap siaga bila terjadi bencana banjir dikala musim penghujan datang. Kerjasamapun wajib dilakukan karena ini mencakup ketentraman dan keselamatan masyarakat yang berada di Kecamatan Rancaekek, karena jika dilihat Kecamatan Rancaekek itu kurang dalam resapan air.

Faktor penghambat BPPD dalam berkoordinasi dengan instansi lain dalam menaggulangi bencana banjir di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung antara lain : Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana, Jangkauan lokasi yang harus ditempuh Badan Penanggulangan Bancana Daerah dalam menanggulangi bencana, Masih kurangnya sosialisasi dan informasi yang di dapat masyarakat terhadap bencana banjir, Belum menyeluruhnya tindakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rancaekek

Penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam koordinasi penanggulangan bencana antara lain :

1. Terjalannya komunikasi agar mendapat informasi yang lebih tepat antara pimpinan maupun bawahan, atau antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Instansi lainnya yang

bekerjasama dalam penanggulangan bencana

2. Harus adanya integrasi, yaitu suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan dalam penanggulangan bencana
3. Rutin di adakannya forum diskusi dalam penanggulangan bencana antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Instansi lainnya
4. Adanya kesatuan tindakan yang selaras antar anggota dalam penanggulangan bencana
5. Adanya pembagian kerja yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan

Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan Koordinasi Penanggulangan Bencana banjir berjalan dengan baik dan efisien.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis melalui pendekatan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006:88) menunjuk pada empat pencapaian keberhasilan dalam Koordinasi, yaitu melalui Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin.

- a. Pada konteks kesatuan tindakan dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi-instansi yang membantu dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rancaekek masih belum optimal.

Karena saat terjadinya bencana banjir di Kecamatan Rancaekek tidak semua daerah yang berada di Kecamatan Rancaekek mendapatkan bantuan maupun perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi yang membantu dalam penanggulangan bencana banjir.

- b. Pada konteks Komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan, dan Dinas Sosial sudah terbilang baik karena adanya komunikasi melalui rapat, dan media telpon.
- c. Pada konteks Pembagian Kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi yang membantu dalam penanggulangan bencana sudah berjalan dengan baik karena pembagian kerja yang dilakukan sudah jelas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Dinas Sosial akan tetapi masih ada sedikit masalah karena masih adanya ketidak jelasan informasi dalam upaya penanggulangan bencana banjir.
- d. Pada konteks Disiplin yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi yang membantu dalam penanggulangan bencana sudah terbilang baik, karena sudah sesuai dengan pembagian kerja yang sudah ditetapkan dalam rapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adapun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam disiplin dengan mengadakan satgas (satuan tugas) di malam hari.

Faktor Penghambat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rancaekek dapat diatasi dengan Terjalannya komunikasi agar mendapat informasi yang lebih tepat antara pimpinan maupun bawahan, atau antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Instansi lainnya yang bekerjasama dalam penanggulangan bencana antara lain harus adanya integrasi, yaitu suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan dalam penanggulangan bencana rutin diadakannya forum diskusi dalam penanggulangan bencana antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Instansi lainnya, adanya kesatuan tindakan yang selaras antar anggota dalam penanggulangan bencananya pembagian kerja yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan.

## 5.2 Saran

1. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung di sarankan lebih mengoptimalkan koordinasi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung bersama instansi-instansi yang bekerjasama dalam penanggulangan bencana agar lebih meneyeluruh.
2. Bagi Camat Rancaekek dan Masyarakat Kecamatan

Rancaekek sebaiknya saling memberikan informasi setiap ada bencana maupun adanya tanda-tanda munculnya bencana banjir kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung agar terciptanya kerjasama dalam penanggulangan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. Hari. (2003). Manajemen. Edisi kedua. Cetakan kedelapan belas. Yogyakarta: BPFYogyakarta
- Malayu S.P, Hasibuan. (2006). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi revisi. Cetakan keenam. Jakarta : Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduh, (2011). Kybernology. Jakarta : Rineka Cipta
- Putra, A. Hani. (2014). Pengertian dan Tujuan Koordinasi. Jakarta: Wahyu Media.

## Dokumen dan Sumber lain :

- Republik, Indonesia, Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana
- Peraturan daerah no 11 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung